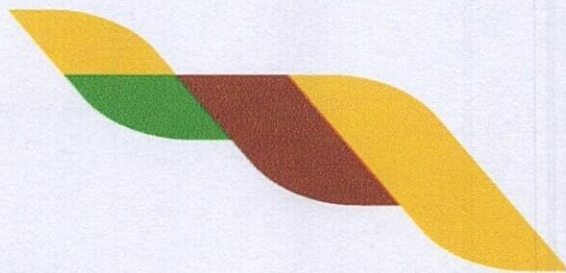


**LAPORAN BULANAN BPP PROVINSI PAPUA
TENGAH BULAN MARET 2025**



BPP

BADAN PENGARAH PAPUA

**WILAYAH BPP PAPUA TENGAH
POKJA PAPUA SEHAT, CERDAS, PRODUKTIF DAN POLHUKAM
TAHUN 2025**





**PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN
OTONOMI KHUSUS PAPUA (BP3OKP)
SEKRETARIAT BP3OKP PROVINSI PAPUA TENGAH**

JALAN MERDEKA NO 46 NABIRE
Kontak : (0984) 22350; Email: bpp.papteng@gmail.com
Website : <https://badanpengarahpapua.go.id/>

Nomor : 03/III/2025/BPP.PT Nabire, 25 Maret 2025
Lampiran : -
Perihal : Laporan Kegiatan BP3OKP Bulan Yth. **Kepada**
Maret 2025 **Yth. Deputi III Set**
Wapres RI

di
Jakarta.

Surat Pengantar

1. Berdasarkan :
 - a) Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
 - b) Peraturan Ketua BP3OKP No.1 Tahun 2023 tentang OTK BP3OKP sesuai Pasal 2 dan 3 Tugas dan Fungsi BP3OKP.
2. Laporan Bulanan BP3OKP Papua Tengah Bulan Maret 2025
3. Demikian untuk menjadi Maklum.

NABIRE, 25 MARET 2025

ANGGOTA BP3OKP PAPUA TENGAH

IRJEN POL (P) DRS.PIETRUS WAINE, S.H.,M.HUM

Tembusan:
Kanwil DJPB Provinsi Papua

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	4
A. KEGIATAN STRATEGIS BPP PAPUA TENGAH (ANGGOTA DAN POKJA)...	5
B. CAPAIAN PEMBANGUNAN PROYEK.....	5
C. REKOMENDASI ANGGOTA BPP TERKAIT PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN.....	6
D. KESIMPULAN DAN PENUTUP.....	6

Ringkasan Eksekutif

BP3OKP/BPP adalah Badan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No.2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus dan Badan Khusus yang berkedudukan langsung dibawah Wakil Presiden. Sesuai dengan Tugas dan Fungsi BPP dalam melaksanakan SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi) maka terdapat beberapa Program Kerja yang telah dilaksanakan oleh Anggota BPP Papua Tengah Bersama Dengan Pokja di Bulan Februari ini diantaranya adalah :

1. Kegiatan BP3OKP bidang Politik hukum dan keamanan (Polhukam)
 - Penjemputan Gubernur dan wakil Gubernur Papua Tengah (5/03/2025)
 - Rapat Tindak lanjut Rekomendasi Koordinasi dengan BPP Jayapura (5/03/2025)
 - Rapat paripurna DPR (6/03/2025)
 - Rapat SHEK penyelesaian batas Wilayah adat antara suku mee dan suku kamoro/wee (10/03/2025)
 - Rapat SHEK Perkenalan BP3OKP di Paniai, Deiyai dan dogiyai (11-14/03/2025)
 - Rapat Teknis BPP dan KPPN Nabire (15/03/2025)
 - Rapat SHEK Perkenalan BP3OKP di Timika Bersama pemda Timika, puncak dan puncak jaya. (17-19/03/2025)
 - Diundang membawa sambutan di acara musrembang nabire papua tengah (20/03/2025)
 - Rapat SHEK perkenalan BP3OKP di Nabire bersama wakil bupati nabire, Sekda intanjaya beserta staff dan pemda nabire dan pemprov. (21/2025)
 - Menghadiri undangan pelantikan bupati dan wakil bupati Puncak dan mimika, (25/03/2025)
2. Kegiatan BP3OKP bidang Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif
 - Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi Koordinasi dengan BPP Jayapura (5/03/2025)
 - Evaluasi CPNS dan P3K dan PP 106 Tentang kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten.
 - Rapat Tindak Lanjut RS Rujukan bersama Gubernur Papua Tengah dan Bupati nabire (10/03/2025)
 - Rapat SHEK Perkenalan BP3OKP di Paniai, Deiyai dan dogiyai (11-14/03/2025)
 - Kunjungan ke 2 sekolah yayasan YPPk dan YPPGI di dogiyai dan Deiyai
 - Rapat Teknis BPP dan KPPN Nabire (15/03/2025)
 - Rapat SHEK Perkenalan BP3OKP di Timika Bersama pemda Timika, puncak dan puncak jaya. (17-19/03/2025)
 - Rapat Koordinasi mengenai stanting, pendidikan dan produktifitas di Pt. Freeport (18/03/2025)
 - Rapat SHEK perkenalan BP3OKP di Nabire bersama wakil bupati nabire, Sekda intanjaya beserta staff dan pemda nabire dan pemprov. (21/2025)

Program-Program kerja yang telah dijalankan Oleh BPP bertujuan untuk tercapainya visi-misi BPP sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2021 "Terwujudnya Papua Mandiri, Adil dan Sejahtera" dengan salah satu lainnya. Demikianlah beberapa Program Kerja BPP Provinsi Papua Tengah di Bulan Maret yang dapat kami sampaikan.

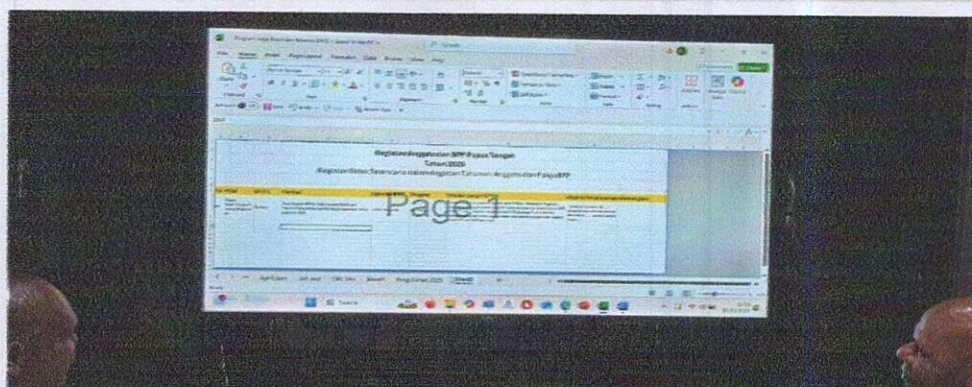
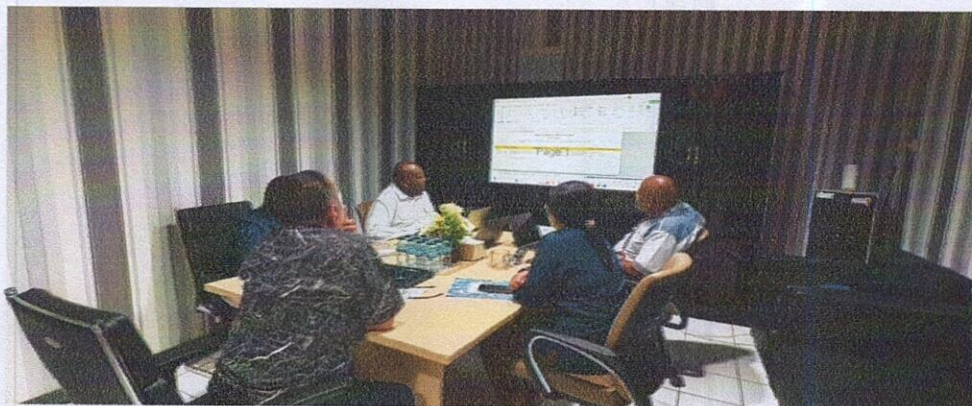
A. KEGIATAN STRATEGIS BPP PAPUA TENGAH (ANGGOTA DAN POKJA)

Adapun Kegiatan anggota BPP Provinsi Papua Tengah bersama dengan Pokja selama bulan Maret 2025 yaitu antara lain sebagai berikut :

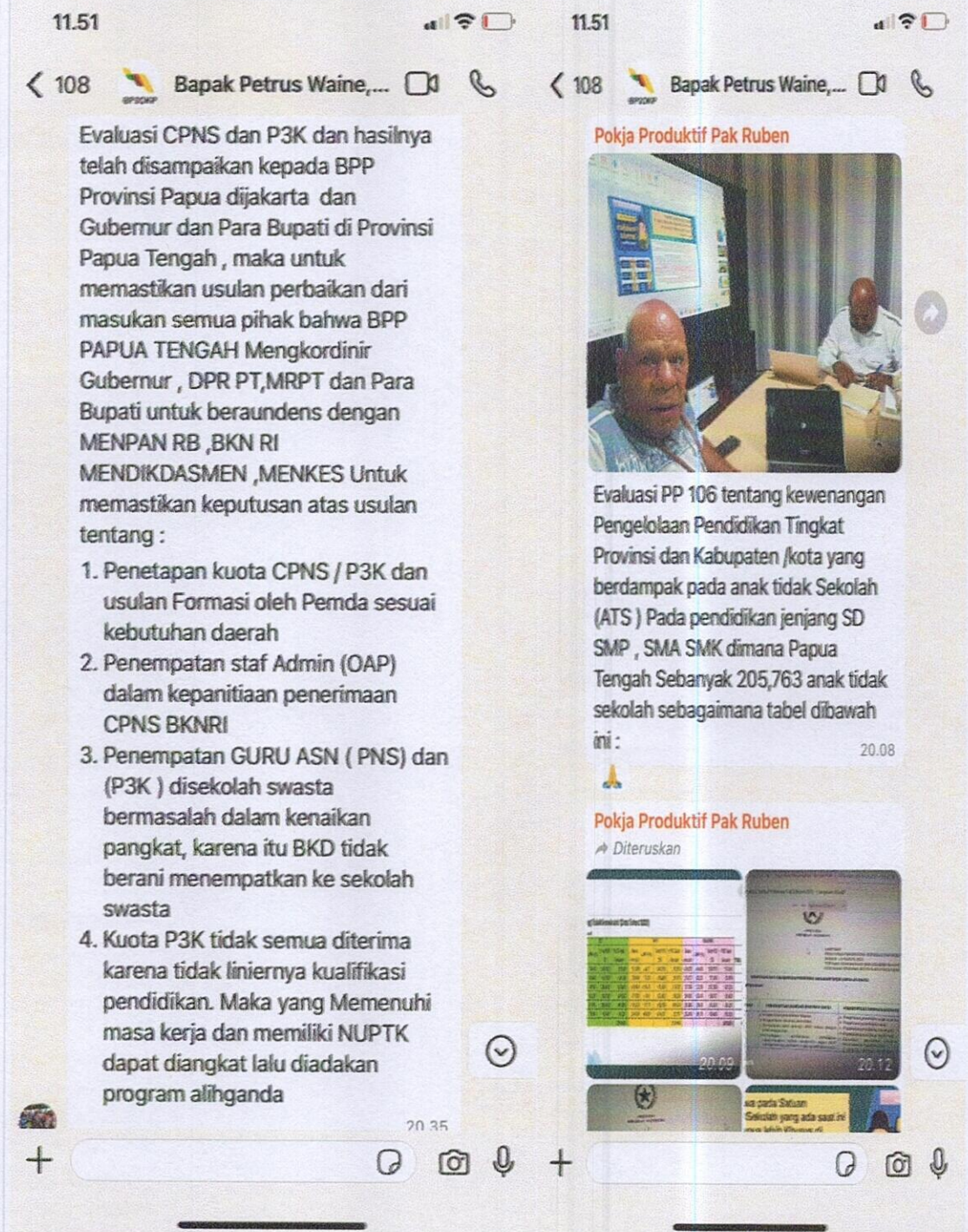
No	KEGIATAN PRIORITAS BPP PAPUA TENGAH (ANGGOTA DAN POKJA)	MISI RIPP
01	Rapat SHEK Perkenalan BP3OKP dengan 8 Kabupaten Papua Tengah dan Provinsi Papua Tengah (11 s. 21 Maret 2025)	Papua Cerdas
02	Rapat SHEK Perkenalan BP3OKP dengan 8 Kabupaten Papua Tengah dan Provinsi Papua Tengah (11 s. 21 Maret 2025)	Papua Produktif
03	Rapat SHEK penyelesaian batas Wilayah adat antara suku mee dan suku kamoro/wee (10/03/2025)	Papua Polhukam
04	Rapat SHEK Perkenalan BP3OKP dengan 8 Kabupaten Papua Tengah dan Provinsi Papua Tengah (11 s. 21 Maret 2025)	Papua Produktif, Papua Sehat dan Papua Cerdas

1. Papua Cerdas, Papua Sehat dan Papua Produktif (Bulan Maret 2025)

- Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi Koordinasi dengan BPP Jayapura (Polhukam juga Masuk)



- Evaluasi CPNS/ P3K dan PP 106 Tentang kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten.(papua cerdas,papua produktif dan Papua Sehat)



- Rapat Tindak Lanjut RS Rujukan bersama Gubernur Papua Tengah dan Bupati Nabire (10/03/2025) (Papua Sehat)

apat BP3OKP.Gubernur Papua Tengah dan Bupati Nabire.Hal : Tindaklanjuti penyelesaian penyelesaian RSUD NabirePoin-point pembahasan:1. Bupati sedang melakukan pembenahan tata kelola pengelolaan SDM RSUD Nabire dengan dengan cara mutasi pejabat dan pegawai RSUD Nabire2. Perencanaan secara keseluruhan kebutuhan RSUD selama 1 tahun3. Penyelesaian utang pembelian Obat 42 M masih di review oleh APIB Kabupaten Nabire bersama BPKP.atas permintaan Bupati4. SANITA air RSUD masih di evaluasi karena ada indikasi penyalahgunaan oleh staf RSUD5. Setelah semua selesai bupati akan melaporkan ke Gubernur sekaligus meminta bantuan yang tidak didapat diselesaikan oleh Bupati Nabire



- Rapat SHEK Perkenalan BP3OKP di 8 kabupaten dan provinsi Papua Tengah (papua Sehat, papua produktif, papua cerdas dan Polhukam) 11 s.d 21 Maret 2025
 - Rapat SHEK Perkenalan BP3OKP dideiyai

09.32



Rapat SHEK Kab. Deiyai.pdf ▾

Kesimpulan

Di dalam pelaksanaan kegiatan SHEK BP3OKP dengan Pemerintah Kabupaten Deiyai telah menyimpulkan beberapa Kesimpulan diantaranya:

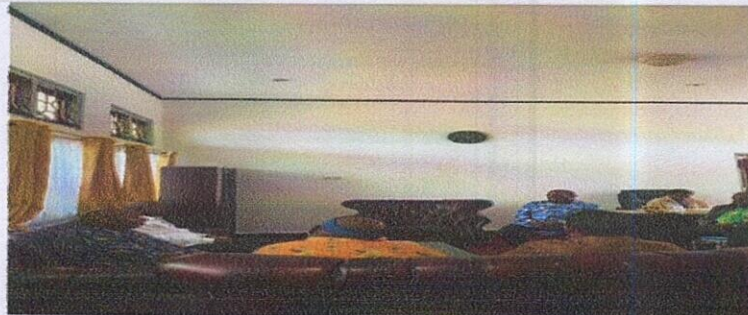
1. Faktor Penghambat Pembangunan di Kabupaten Deiyai adalah faktor Keamanan
2. Alat Tes molekuler TBC disediakan di semua puskesmas
3. Perlu ada persediaan dana OTSUS oleh Pemda untuk diberikan kepada peserta yang sudah dilatih untuk dijadikan sebagai modal usaha.
4. Untuk makanan bergizi (MBG) harus disiapkan oleh Komite Sekolah agar lebih cepat pelayanannya, asupan gizinya dapat dikontrol oleh Sekolah dan Komite secara tepat.

Poin-Poin Tindaklanjut

BP3OKP Papua Tengah akan melaksanakan SHEK dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pihak Keamanan (TNI/POLRI), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Kementerian tentang permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat Pembangunan di Kabupaten Deiyai adalah faktor Keamanan
2. Alat Tes molekuler TBC disediakan di semua puskesmas
3. Perlu ada persediaan dana OTSUS oleh Pemda untuk diberikan kepada peserta yang sudah dilatih untuk dijadikan sebagai modal usaha.
4. Untuk makanan bergizi (MBG) harus disiapkan oleh Komite Sekolah agar lebih cepat pelayanannya, asupan gizinya dapat dikontrol oleh Sekolah dan Komite secara tepat.

Foto Kegiatan Rapat Teknis



- Rapat SHEK Perkenalan BP3OKP di Paniai

09.33



Rapat SHEK Kab. Paniai.pdf ▾

- Akan koordinasi pengembang fungsi keamanan (TNI/POLRI) agar melakukan sistem pengamanan yang melibatkan Sebagian Tokoh Masyarakat.
- Akan melanjutkan semua program yang sudah dikerjakan oleh Bupati sebelumnya

Kesimpulan

Di dalam pelaksanaan kegiatan SHEK BP3OKP dengan Pemerintah Kabupaten Paniai telah menyimpulkan beberapa Kesimpulan diantaranya:

1. Faktor Penghambat Pembangunan di Kabupaten Paniai adalah faktor Keamanan
2. Alat Tes molekuler TBC disediakan di semua puskesmas
3. Perlu ada persediaan dana OTSUS oleh Pemda untuk diberikan kepada peserta yang sudah dilatih untuk dijadikan sebagai modal usaha.
4. Untuk makanan bergizi (MBG) harus disiapkan oleh Komite Sekolah agar lebih cepat pelayanannya, asupan gizinya dapat dikontrol oleh Sekolah dan Komite secara tepat.

Poin-Poin Tindaklanjut

BP3OKP Papua Tengah akan melaksanakan SHEK dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pihak Keamanan (TNI/POLRI), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Kementerian tentang permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat Pembangunan di Kabupaten Paniai adalah faktor Keamanan
2. Alat Tes molekuler TBC disediakan di semua puskesmas
3. Perlu ada persediaan dana OTSUS oleh Pemda untuk diberikan kepada peserta yang sudah dilatih untuk dijadikan sebagai modal usaha.
4. Untuk makanan bergizi (MBG) harus disiapkan oleh Komite Sekolah agar lebih cepat pelayanannya, asupan gizinya dapat dikontrol oleh Sekolah dan Komite secara tepat.

Foto Kegiatan Rapat Teknis



- Rapat SHEK Perkenalan BP3OKP di Dogiyai

09.33



Rapat SHEK Kab. Dogiyai.pdf

2. Alat tes molekuler TBC disediakan di semua puskesmas
3. Perlu ada persediaan dana OTSUS oleh Pemda untuk diberikan kepada peserta yang sudah dilatih untuk dijadikan sebagai modal usaha.
4. Untuk makanan bergizi (MBG) harus disiapkan oleh Komite Sekolah agar lebih cepat pelayanannya, asupan gizinya dapat dikontrol oleh Sekolah dan Komite secara tepat.
5. Pemda memfasilitasi pemasaran hasil pertanian ke Timika Kerjasama PT.Freeport

Poin-Poin TindakanJut

BP3OKP Papua Tengah akan melaksanakan SHEK dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pihak Keamanan (TNI/POLRI), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Kementerian terkait permasalahan sebagai berikut :

1. Tidak adanya koordinasi dan Kerjasama antar Satuan Keamanan pada hal pemda setiap saat menganggarkan dana keamanan, terlihat adanya pembiaran dalam penanganan kasus-kasus kebaran kantor.pasar dll
2. Alat Tes molekuler TBC disediakan di semua puskesmas
3. Perlu ada persediaan dana OTSUS oleh Pemda untuk diberikan kepada peserta yang sudah dilatih untuk dijadikan sebagai modal usaha.
4. Untuk makanan bergizi (MBG) harus disiapkan oleh Komite Sekolah agar lebih cepat pelayanannya, asupan gizinya dapat dikontrol oleh Sekolah dan Komite secara tepat.
5. Pemda memfasilitasi pemasaran hasil pertanian ke Timika Kerjasama PT.Freeport

Foto Kegiatan Rapat Teknis



- Rapat SHEK Perkenalan BP3OKP di Timika

09.34



< Rapat SHEK Keberadaan BP3OKP Pa... >

Kesimpulan

Di dalam pelaksanaan kegiatan SHEK BP3OKP dengan Pemerintah Kabupaten Timika dan Kabupaten Puncak telah menyimpulkan beberapa Kesimpulan diantaranya:

1. Faktor Penghambat Pembangunan di Kabupaten Timika dan Puncak adalah faktor Keamanan
2. Alat Tes molekuler TBC disediakan di semua puskesmas
3. Perlu ada persediaan dana OTSUS untuk Kabupaten Puncak, sedangkan Kabupaten Timika dari APBD untuk diberikan kepada peserta yang sudah dilatih untuk dijadikan sebagai modal usaha.
4. Untuk makanan bergizi (MBG) harus disiapkan oleh Komite Sekolah untuk kabupaten Puncak, dan untuk Kabupaten Mimika yang sudah berjalan menjadi model untuk sekolah lain di Timika.
5. Revitalisasi SMK Terintegrasi BLK,LKP pada SMK YPPGI di Kabupaten Timika
6. pola pendidikan berasrama jenjang SD,SMP,SMA,SMK di titik2 ibu kota puncak. Sedangkan Kabupaten Timika khusus bagi Masyarakat suku Mimika Wae agar dibangun PAUD/TK terintegrasi makanan bergizi di wilayah suku kamoro seperti di paumako

Poin-Poin Tindaklanjut

BP3OKP Papua Tengah akan melaksanakan SHEK dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pihak Keamanan (TNI/POLRI), Tokoh Agama,Tokoh Adat dan Kementerian tentang permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat Pembangunan di Kabupaten Timika dan Puncak adalah faktor Keamanan
2. Alat Tes molekuler TBC disediakan di semua puskesmas
3. Perlu ada persediaan dana OTSUS untuk Kabupaten Puncak, sedangkan Kabupaten Timika dari APBD untuk diberikan kepada peserta yang sudah dilatih untuk dijadikan sebagai modal usaha.
4. Untuk makanan bergizi (MBG) harus disiapkan oleh Komite Sekolah untuk kabupaten Puncak, dan untuk Kabupaten Mimika yang sudah berjalan menjadi model untuk sekolah lain di Timika.
5. Revitalisasi SMK Terintegrasi BLK,LKP pada SMK YPPGI di Kabupaten Timika
6. pola pendidikan berasrama jenjang SD,SMP,SMA,SMK di titik2 ibu kota puncak. Sedangkan Kabupaten Timika khusus bagi Masyarakat suku Mimika Wae agar dibangun PAUD/TK terintegrasi makanan bergizi di wilayah suku kamoro seperti di paumako

Foto Kegiatan Rapat Teknis



- Rapat SHEK Perkenalan BP3OKP di Nabire

09.33



< Rapat SHEK Kab. Nabire Intan Jaya d... >

Kesimpulan

Di dalam pelaksanaan kegiatan SHEK BP3OKP dengan Pemerintah Kabupaten Nabire dan Intan Jaya telah menyimpulkan beberapa Kesimpulan diantaranya:

1. Faktor Penghambat Pembangunan di Kabupaten Nabire dan Intan Jaya adalah faktor Keamanan
2. Alat Tes molekuler TBC disediakan di semua puskesmas
3. Perlu ada persediaan dana OTSUS oleh Pemda untuk diberikan kepada peserta yang sudah dilatih untuk dijadikan sebagai modal usaha.
4. Untuk makanan bergizi (MBG) harus disiapkan oleh Komite Sekolah agar lebih cepat pelayanannya, asupan gizinya dapat dikontrol oleh Sekolah dan Komite secara tepat.
5. Revitalisasi SMK Terintegrasi BLK,LKP pada 2 SMK di Kabupaten Nabire

6. pola pendidikan berasrama jenjang SD,SMP,SMA,SMK di titik2 ibu kota puncak,puncak jaya dan intan jaya

Poin-Poin Tindaklanjut

BP3OKP Papua Tengah akan melaksanakan SHEK dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pihak Keamanan (TNI/POLRI) dan Kementerian tentang permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat Pembangunan di Kabupaten Nabire dan Intan Jaya adalah factor Keamanan
2. Alat Tes molekuler TBC disediakan di semua puskesmas
3. Pendirian Politeknik untuk penyediaan tenaga medis di Kabupaten Nabire
4. Perlu ada persediaan dana OTSUS oleh Pemda untuk diberikan kepada peserta yang sudah dilatih untuk dijadikan sebagai modal usaha.
5. Untuk makanan bergizi (MBG) harus disiapkan oleh Komite Sekolah agar lebih cepat pelayanannya, asupan gizinya dapat dikontrol oleh Sekolah dan Komite tepat.
6. Revitalisasi SMK Terintegrasi BLK,LKP pada 2 SMK di Kabupaten Nabire
7. pola pendidikan berasrama jenjang SD,SMP,SMA,SMK di titik2 ibu kota puncak,puncak jaya dan intan jaya

Foto Kegiatan Rapat Teknis



- Kunjungan ke SMK YPPK Deiyai dan SMK YPPGI Idakebo Dogiyai
 - Kab. Deiyai



- Kab. Dogiyai



- Rapat Koordinasi mengenai stunting, pendidikan dan produktifitas di Pt. Freeport



1. Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam)
 - Penjemputan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah



- Rapat Paripurna DPR



Pengucapan sumpah/janji ketua dan wakil ketua dewan perwakilan rakyat papua tengah
Masa Jabatan 2024-2029

- Rapat SHEK penyelesaian batas Wilayah adat antara suku mee dan suku kamoro/wee



Pokok-Pokok Agenda Rapat

Ada 5 pokok agenda yang didiskusikan pada rapat teknis antara BPP PPT dengan KPPN Nabire yakni:

- 1 Peta Batas Wilayah Adat menurut Suku Mee
 - a. Batas wilayah Versi Kepala Suku Sub Rayon Distrik, Pemilik Hak Ulat masing-masing Kampung, Dusun Suku Mee dan LSM.....
 - b. Batas Alam (Sungai, gunung, pohon, batas perburuan, kebun, dll)
 - c. Batas Menurut Keputusan Pengadilan (batas mengaju jalan trans)
 - d. Batas Kesepakatan Yang Sudah di buat antara Suku Mee dan Suku Kamoro (musa muda, ketua tim peduli alam simapitowa)
- 2 Nama Kampung yang berda pada batas wilayah suku mee dan kamoro
- 3 Nama Marga Pemilik Tanah Adat yang berdiam/berdominsli di batas wilayah adat Suku Mee dan Kamoro
- 4 Kesimpulan

- Diundang membawa sambutan di acara musrembang nabire papua tengah

BP3OKP Papua hadir dalam Musrembang Papua Kabupaten Nabire yang dilaksanakan di Aula Rapat Bapperinda Kabupaten Nabire, Kamis 20 Maret 2025.

Mengawal proram papua cerdas.papua sehat.papua produktif dan papua polhukan sesuai RIPPP dan RAPPP tahun anggaran 2026



- Menghadiri undangan pelantikan bupati dan wakil bupati Puncak dan mimika di Nabire .(25/03/2025)



Demikian Rangkuman hasil yang di capai dari kegiatan BP3OKP di Bulan Maret 2025 sebagai berikut.

B. CAPAIAN PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS

Belum terdapat Capaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Proyek Strategis Daerah (PSD).

C. REKOMENDASI ANGGOTA BPP TERKAIT PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA WILAYAH PAPUA TENGAH

Berdasarkan hasil evaluasi Anggota dan Pokja BPP Papua Tengah selama pelaksanaan Kegiatan sesuai Tugas dan Fungsi selama bulan Maret 2025, memberikan Rekomendasi sebagai Upaya optimalisasi pelayanan percepatan Pembangunan Otonomi Khusus di wilayah Provinsi Papua Tengah.

Ada dua rekomendasi yaitu :

1. Sesuai Tusi dan Fungsi SHEK BPP

Adapun usulan yang disampaikan anggota BPP agar tercapainya Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Tengah antara lain:

- a Banyak program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi kelompok kerja (papua sehat, papua cerdas, papua produktif dan papua polhukam) namun tidak dibarengin dengan dukungan biaya;
- b Dari kesimpulan rapat SHEK di 8 wilayah adat dan provinsi, kami akan kawal setiap program yang kerja 5 tahun kedepan gubernur dan 8 bupati di papua tengah khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, produktifitas dan politik hukum dan keamanan;
- c Berkaitan Rapat SHEK penyelesaian batas wilayah adat antara suku mee & suku kamoro/wee akan berlanjut dan atau diprioritaskan karena kami akan mengundang suku kamoro/wee untuk menyampaikan sesuai versi mereka yang tinggal dibatas wilayah adat tersebut;
- d Percepatan penuntasan kemiskinan dan pengangguran ekstrim di Provinsi Papua Tengah, maka program SMK Terintegrasi Balakai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Sangkar Kegiatan Belajar (SKB)/PKBM menjadi Prioritas dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga dan bersa
- e PP 106 tentang kewenangan pengelolaan pendidikan menengah sebagaimana diatur dalam lampiran PP 106 agar dapat direvisi dan pengelolaan kewenangan dialihkan ke Provinsi, karena Kabupaten mengalami devisa anggaran ;
- f Pembagian presentasi anggaran OTSUS sebagaimana diatur dalam UU No 2 tahun 2021, dapat direview untuk tidak berpatokan pada presentasi, namun diberi keleluasaan kepada Pemda untuk dapat menyesuaikan kondisi wilayah serta kebutuhan prioritas dari masing-masing Kabupaten/kota;
- g Berdasarkan huruf c.d dan e diatas, jika tidak mendapat dukungan penyelesaian maka akan berdampak pada masalah kejahatan konvensional/tradisional seperti pemalangan, pembunuhan, perampokan, pembakaran, pengrusakan kantor-kantor public/pemerintah dan swasta, pencurian, narkoba, dan lain sebagainya.

2. Tata Kelola Sekretaritan BPP

BP3OKP sebagai lembaga Nonlembaga Negara yang melaksanakan Tugas dan Fungsi SHEK mengalami kendala dalam tata Kelola Keuangan sehingga BP3OKP terkesan tidak terlihat kinerja.

Berikut beberapa rekomendasi hasil Evaluasi Anggota dan Pokja BPP Papua Tengah sebagai berikut :

- a. Belum terpenuhinya Hak Fasilitas berupa kendaraan, perumahan, asuransi kerja, THR hari-hari besar bagi Anggota dan Kelompok Kerja dan sekretariat BPP Papua sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) Perpres No 121 tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (BP3OKP)
- b. Dalam Buku Saku tentang Dukungan Administratif dari Sekretariat Badan Pengarah Papua belum menguraikan Harga Satuan Perjalanan Dinas sesuai dengan standar biaya tingkat kemahalan di wilayah Papua Tengah sehingga sangat menghambat pelaksanaan percepatan program dan kegiatan BPP Papua Tengah;
- c. Belum tersedianya dana Cadangan/Kontigensi (keadaan/situasi darurat yang segera ditangani/direspon oleh BPP Papua Tengah, sehingga kasus pembunuhan,kasus perkelahian antar suku, pemalangan jalan, korban akibat kecelakaan, bencana alam mengalami keterlambatan dalam penanganannya;
- d. Banyak kegiatan BPP Papua Tengah yang semestinya harus diketahui oleh Masyarakat publik, namun selama ini tidak terpublikasi sama sekali dikarenakan belum tersedianya biaya Publikasi/Media di KPPN Nabire;
- e. Kedudukan BPP Papua di masing-masing Provinsi,sesuai pasal 68.a UU No 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, agar disamakan dengan Badan-Badan Khusus lain yaitu MRPT,DPRPPT,DPRK,BP3OKP dan DPD RI dalam kedudukan dan penganggaran.

D. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Berdasarkan Kegiatan BPP Papua Tengah di bulan Maret 2025, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan SHEK diperlukan kolaborasi yang berkelanjutan dengan semua pihak terutama Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah, MRPPT,DPRPT, DPRPPT, dan Para Bupati serta mitra pembangunan lainnya.

Demikian Laporan Bulanan yang dapat Kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

